

PENDAMPINGAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA UMKM PRODUK UNGGULAN DAERAH ARAYA KOTA MALANG

Yeni Tata Rini^{*1}, Nindia Nur Arifiana Putri², Tri Cicik Wijayanti³, Ronny Hendra Hertanto⁴, Ine Rahmadania Saldianovitta⁵

^{1,2,4}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajayana, Kota Malang

^{3,5}Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajayana, Kota Malang

*yeni.tatarini@unigamalang.ac.id

Abstract. Financial management is an important determinant of micro, small, and medium enterprise (MSME) sustainability, yet transaction recording among micro businesses is often informal and inconsistent. This community engagement program aimed to strengthen financial literacy, daily transaction recording, Cost of Goods Sold (COGS) calculation, and simple income statement preparation among eight featured-product MSMEs in Araya, Malang City. The program adopted a participatory action research (PAR) approach for four months. Instruments included product-specific daily cash books, simple financial statement templates, and the BukuKas digital recording application. Data were collected through pre- and post-tests, participatory observation, interviews, focus group discussions, and document review. Initial assessment showed that all partners mixed personal and business finances, while the mean financial literacy score was 42.5 out of 100. After mentoring, the mean score increased to 78.3, representing an 84.2% increase from the baseline. Seven of eight partners maintained daily cash books consistently for at least two months, and all partners independently prepared simple income statements. Two partners also used their financial documents to support access to People's Business Credit and regional featured-product curation. The findings indicate that practical, participatory, and business-specific mentoring is more supportive of behavioral change than training focused only on knowledge transfer. The program also contributes to SDG 8 on decent work and economic growth and SDG 9 on industry, innovation, and infrastructure.

Keywords: *financial literacy; MSMEs; transaction recording; cost of goods sold; participatory action research*

Abstrak. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi praktik pencatatan transaksi pada usaha mikro masih sering dilakukan secara sederhana dan tidak konsisten. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi keuangan, keterampilan pencatatan transaksi harian, kemampuan menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP), dan penyusunan laporan laba rugi sederhana pada delapan UMKM produk unggulan di kawasan Araya, Kota Malang. Program menggunakan pendekatan participatory action research (PAR) selama empat bulan. Instrumen kegiatan berupa buku kas harian yang disesuaikan dengan karakteristik usaha, template laporan keuangan sederhana, serta aplikasi pencatatan digital BukuKas. Data diperoleh melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, wawancara, focus group discussion, dan pemeriksaan dokumen pencatatan. Hasil awal menunjukkan bahwa seluruh mitra masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha dan skor literasi keuangan rata-rata hanya 42,5 dari 100. Setelah pendampingan, skor rata-rata meningkat menjadi 78,3 atau bertambah 84,2% dari kondisi awal. Tujuh dari delapan mitra mampu mempertahankan buku kas harian secara konsisten selama sekurang-kurangnya dua bulan, sedangkan seluruh mitra dapat menyusun laporan laba rugi sederhana secara mandiri. Dua mitra juga berhasil menggunakan dokumen keuangan untuk mendukung akses Kredit Usaha Rakyat dan proses kurasi produk unggulan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pendampingan yang praktis, partisipatif, dan disesuaikan dengan karakter usaha lebih mendukung perubahan kebiasaan dibandingkan pelatihan yang hanya berorientasi pada penyampaian materi. Program sekaligus mendukung

SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta SDG 9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur.

Kata kunci: literasi keuangan; UMKM; pencatatan transaksi; Harga Pokok Penjualan; participatory action research

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya terlihat dari jumlah unit usaha, tetapi juga dari kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja, menciptakan pendapatan, dan menjaga aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Literatur mengenai UMKM menempatkan sektor tersebut sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat karena aktivitasnya tersebar pada perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan berbagai usaha berbasis sumber daya lokal (Tambunan, 2019). Data Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip dalam naskah sumber menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61,97% terhadap PDB dan menyerap 96,99% tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut menjadikan penguatan kapasitas UMKM sebagai bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi.

Kota Malang memiliki lingkungan usaha yang berkembang sejalan dengan aktivitas perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif. Di kawasan Araya terdapat pelaku usaha yang mengembangkan produk makanan olahan, kerajinan, batik, dan produk cendera mata. Produk tersebut memiliki nilai ekonomi karena memanfaatkan keterampilan lokal dan memiliki peluang pemasaran di dalam maupun di luar kota. Potensi tersebut belum selalu diikuti dengan kapasitas administrasi yang memadai. Bagi usaha mikro, kelemahan administrasi sering tidak terlihat ketika penjualan sedang ramai, tetapi menjadi persoalan ketika pemilik membutuhkan informasi tentang laba, kebutuhan modal kerja, atau kelayakan pengembangan produk.

Masalah yang paling menonjol pada mitra kegiatan adalah pencatatan transaksi yang belum tertib. Observasi awal menunjukkan bahwa transaksi sering ditulis secara sporadis, sebagian hanya diingat oleh pemilik, dan belum menggunakan format yang membedakan penerimaan, pengeluaran, serta saldo. Keadaan tersebut membuat pemilik sulit memperoleh gambaran mengenai posisi keuangan usaha. Pencampuran uang rumah tangga dengan uang usaha juga menyebabkan arus kas bisnis tidak dapat ditelusuri dengan baik. Romain et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi dan pengelolaan keuangan

berhubungan dengan kinerja UMKM; karena itu, persoalan pencatatan tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah administratif.

Ketiadaan catatan yang rapi juga mempengaruhi akses pembiayaan. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang dapat membantu menilai kondisi dan kemampuan usaha. Ketika pemilik tidak mempunyai bukti transaksi serta laporan sederhana, proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih sulit. Di sisi lain, pencatatan yang baik dapat digunakan untuk menilai kebutuhan modal, memperkirakan arus kas, dan menjelaskan kondisi usaha kepada pihak eksternal (Kurniawan et al., 2012; Maleha, 2015). Dengan demikian, pencatatan transaksi mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan penentuan harga jual. Sejumlah pelaku usaha menetapkan harga dengan mengikuti harga pasar atau pesaing tanpa menghitung seluruh biaya yang benar-benar melekat pada produk. Bahan baku utama biasanya diperhitungkan, sedangkan biaya listrik, transportasi, penyusutan peralatan, bahan penolong, dan kontribusi tenaga kerja pemilik sering terlewat. Akibatnya, HPP menjadi terlalu rendah dan margin yang dianggap sebagai laba belum tentu merupakan laba ekonomi yang sebenarnya (Supriyono, 2011). Informasi biaya yang akurat diperlukan agar harga jual dapat ditentukan secara rasional dengan mempertimbangkan biaya, margin yang diharapkan, dan kondisi pasar (Kotler & Keller, 2016).

Rendahnya penerapan pencatatan tidak selalu menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak peduli terhadap keuangan. Hambatan dapat berasal dari persepsi bahwa akuntansi sulit, keterbatasan waktu, rendahnya literasi keuangan, serta tidak tersedianya format yang sederhana. Program pelatihan yang berhenti setelah penyampaian materi juga belum tentu menghasilkan perubahan kebiasaan. Munizu (2010) dan Kushnir et al. (2010) memperlihatkan pentingnya faktor internal dan eksternal dalam pengembangan kinerja usaha kecil. Karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menemani proses penerapan.

Program ini menggunakan participatory action research (PAR). Pendekatan tersebut menempatkan mitra sebagai pelaku aktif dalam identifikasi masalah, penyusunan solusi, penerapan, dan evaluasi (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Instrumen pencatatan tidak dibuat seragam untuk semua mitra. UMKM kuliner memerlukan perhatian pada

pembelian bahan baku yang cepat berputar, biaya gas dan listrik, serta penjualan konsinyasi. Sebaliknya, UMKM kerajinan membutuhkan pencatatan jam kerja, bahan pewarna, dan biaya produksi lain. Penyesuaian ini diharapkan membuat sistem lebih mudah digunakan dan bertahan setelah program selesai.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan. Pertama, bagaimana kondisi awal pemahaman dan praktik pencatatan transaksi pada UMKM produk unggulan di Araya? Kedua, bagaimana pendampingan intensif berbasis PAR meningkatkan literasi dan keterampilan administrasi keuangan? Ketiga, bagaimana perubahan tersebut mendukung penyusunan laporan sederhana dan kemandirian pengelolaan usaha? Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman tentang pemisahan kas pribadi dan usaha, meningkatkan keterampilan pencatatan dan perhitungan HPP, serta memperkenalkan teknologi digital yang mudah diterapkan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 UMKM dan Penguatan Kapasitas Usaha

UMKM mempunyai karakter berbeda dari perusahaan yang memiliki struktur manajemen formal. Pemilik usaha mikro biasanya terlibat langsung dalam produksi, pembelian, penjualan, pemasaran, dan pengelolaan kas. Keterbatasan tenaga dan modal membuat fungsi administrasi sering ditempatkan sebagai aktivitas sekunder. Padahal, informasi keuangan diperlukan untuk mengetahui kemampuan usaha menghasilkan laba, menjaga modal kerja, dan menentukan prioritas pengembangan. Tambunan (2019) menegaskan pentingnya UMKM dalam ketahanan ekonomi, sedangkan Soeseno et al. (2023) menyoroti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan strategi pemasaran sebagai unsur yang berhubungan dengan kinerja UKM.

Keterbatasan administrasi dapat menimbulkan efek berantai. Ketika transaksi tidak dicatat, pemilik kehilangan dasar untuk mengevaluasi produk. Ketika biaya tidak dihitung, harga jual tidak dapat dinilai secara objektif. Selanjutnya, ketika laporan tidak tersedia, akses terhadap sumber pembiayaan formal menjadi lebih terbatas. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas administrasi keuangan merupakan bagian dari penguatan kapasitas usaha, bukan aktivitas tambahan yang terpisah dari kegiatan produksi.

2.2 Literasi Keuangan dan Pencatatan Transaksi

Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan literasi keuangan sebagai kemampuan memahami informasi keuangan dan menggunakan pemahaman tersebut untuk mengambil keputusan. Pada UMKM, literasi keuangan diterjemahkan ke dalam kemampuan yang sangat praktis: membedakan uang usaha dan uang pribadi, memahami arus kas, mengenali biaya, menghitung HPP, menetapkan harga, dan membaca hasil usaha. Aribawa (2016) menunjukkan bahwa literasi keuangan mempunyai keterkaitan dengan kinerja dan keberlangsungan UMKM.

Pencatatan transaksi merupakan bentuk penerapan literasi keuangan dalam kegiatan sehari-hari. Setiap penerimaan dan pengeluaran perlu dicatat secara teratur sehingga tersedia jejak transaksi yang dapat digunakan untuk evaluasi. Weygandt et al. (2019) menempatkan pencatatan sebagai dasar penyusunan informasi akuntansi. Dalam konteks UMKM, format pencatatan dapat dibuat sederhana selama mampu menjawab kebutuhan dasar: berapa kas masuk, berapa kas keluar, transaksi apa yang terjadi, dan berapa saldo usaha.

Indonesia juga telah memiliki SAK EMKM sebagai rujukan pelaporan entitas mikro, kecil, dan menengah. Namun, literatur menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi kendala kapasitas dan persepsi pelaku usaha (Rudiantoro & Siregar, 2012; Manehat & Sanda, 2022). Oleh karena itu, pendampingan untuk UMKM mikro perlu dimulai dari kebiasaan dasar sebelum diarahkan pada sistem pelaporan yang lebih lengkap.

2.3 Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha

Business entity concept mengharuskan aktivitas ekonomi usaha dipandang terpisah dari aktivitas pemilik (Kieso et al., 2019). Pada praktik UMKM, prinsip ini dapat diterapkan melalui rekening atau kas terpisah. Penjualan yang diterima usaha tetap menjadi kas usaha sampai dicatat sebagai pengambilan pemilik. Demikian pula, dana pribadi yang digunakan untuk membeli bahan baku perlu dikenali sebagai tambahan investasi atau setoran pemilik.

Pencampuran dana menimbulkan kesulitan ketika pemilik ingin menghitung laba. Pengeluaran rumah tangga dapat terlihat seperti biaya usaha, sedangkan tambahan modal dari pemilik tidak terdokumentasi. Holmes dan Nicholls (1988) menunjukkan bahwa

penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Drexler et al. (2014) juga menunjukkan bahwa aturan sederhana dapat membantu pemilik usaha membangun disiplin finansial. Dengan demikian, pemisahan kas menjadi langkah awal yang realistis untuk memperbaiki pengendalian keuangan.

2.4 HPP dan Penetapan Harga

HPP menggambarkan biaya yang berkaitan dengan barang yang dijual. Pada usaha dagang, perhitungan dasarnya menggunakan persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir. Pada usaha produksi, komponen biaya dapat mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dalam praktik UMKM, batas antar komponen tersebut sering tidak terlihat sehingga pemilik cenderung hanya menghitung biaya bahan utama.

Pengabaian biaya kecil dapat terakumulasi menjadi selisih yang berarti. Listrik, gas, transportasi, bahan penolong, penyusutan alat, dan tenaga kerja pemilik perlu dipertimbangkan agar biaya produk tidak terlalu rendah. Mulyani et al. (2021) menunjukkan pentingnya pelatihan perhitungan harga pokok produksi bagi UMKM. Informasi biaya kemudian dapat dipadukan dengan kondisi pasar dan target margin untuk menentukan harga jual yang wajar (Kotler & Keller, 2016).

2.5 Laporan Keuangan Sederhana

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi yang telah dicatat dan dikelompokkan. Pada tahap awal, UMKM dapat menggunakan laporan laba rugi sederhana dan catatan arus kas. Laba rugi membantu pemilik melihat pendapatan, HPP, biaya operasional, dan laba bersih. Arus kas membantu melihat kemampuan usaha menyediakan kas untuk kegiatan sehari-hari.

Laporan sederhana juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Data yang tersusun dapat digunakan saat pemilik berdiskusi dengan lembaga keuangan, pemasok, mitra, maupun pemerintah daerah. Kurniawan et al. (2012) menempatkan kesiapan administrasi sebagai salah satu isu penting dalam akses modal perbankan. Bagi UMKM, format yang sederhana dan mudah diisi lebih realistis daripada sistem yang terlalu kompleks (Manehat & Sanda, 2022).

2.6 Pendampingan Partisipatif dan Teknologi Digital

PAR menggabungkan tindakan dan proses refleksi. Mitra tidak hanya menerima instruksi, tetapi ikut menentukan masalah dan menguji solusi yang sesuai dengan situasi mereka (Kindon et al., 2007). Dalam kegiatan UMKM, metode ini dapat diterapkan melalui siklus identifikasi masalah, praktik pencatatan, pemeriksaan, perbaikan, dan pengulangan.

Teknologi digital dapat mempercepat proses tersebut. Aplikasi pencatatan pada telepon pintar memungkinkan transaksi dicatat ketika terjadi dan laporan dasar dapat dihasilkan lebih cepat. Namun, teknologi tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Keterbatasan literasi digital, rasa tidak percaya diri, dan kekhawatiran mengenai data dapat menjadi penghambat (Paramitha et al., 2022). Pendampingan diperlukan agar teknologi digunakan sesuai kemampuan dan kebutuhan mitra. Penggunaan aplikasi juga perlu dipandang sebagai pilihan alat, bukan tujuan utama program.

2.7 Keterkaitan dengan SDGs

Penguatan kapasitas UMKM berhubungan dengan SDG 8 karena usaha yang lebih tertata memiliki peluang lebih besar untuk menjaga produktivitas, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan. Program juga berhubungan dengan SDG 9 melalui penggunaan teknologi digital dan penguatan infrastruktur informasi usaha (United Nations, 2015; UNDP, 2020). Hubungan tersebut menjadi lebih bermakna ketika teknologi dan administrasi tidak berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar digunakan untuk memperbaiki keputusan usaha.

3. METODOLOGI

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan participatory action research selama empat bulan dan melibatkan delapan UMKM produk unggulan di kawasan Araya, Kota Malang. Mitra berasal dari sektor kuliner khas Malang dan kerajinan batik tulis serta produk souvenir. Pemilihan mitra mempertimbangkan karakter produk unggulan dan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian pendampingan.

Tahap pertama adalah persiapan dan pemetaan. Tim berkoordinasi dengan pihak setempat, mengidentifikasi kondisi administrasi masing-masing usaha, melakukan observasi transaksi, serta memberikan pre-test literasi keuangan. Pre-test terdiri atas 20

pertanyaan mengenai pemisahan kas, HPP, laporan laba rugi, dan fungsi pencatatan. Hasil pemetaan menjadi dasar penyesuaian instrumen.

Tahap kedua adalah pembenahan pemisahan keuangan. Mitra didorong memiliki kas atau rekening usaha yang berbeda dari keuangan pribadi. Tim juga mendiskusikan aturan sederhana mengenai penarikan uang untuk kebutuhan rumah tangga sehingga pengambilan tersebut tidak tercampur dengan biaya usaha.

Tahap ketiga adalah penerapan buku kas harian. Format memuat tanggal, uraian transaksi, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Untuk usaha kuliner ditambahkan kebutuhan pencatatan bahan baku, biaya gas dan listrik, serta transaksi konsinyasi. Untuk kerajinan, format menekankan bahan pewarna, jam kerja, dan biaya produksi yang relevan.

Tahap keempat adalah pengenalan aplikasi BukuKas. Pendampingan dilakukan bertahap sesuai kemampuan digital mitra. Buku manual tetap dipertahankan sebagai pilihan bagi mitra yang belum siap menggunakan aplikasi. Frekuensi pendampingan dimulai dua kali per minggu pada bulan pertama dan kemudian dikurangi menjadi satu kali per minggu. Penurunan intensitas dimaksudkan untuk menguji kemandirian mitra.

Data dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dari observasi, wawancara, dan FGD digunakan untuk melihat perubahan kebiasaan, hambatan, serta strategi adaptasi. Data kuantitatif dari pre-test dan post-test dibandingkan untuk melihat perubahan skor. Dokumen buku kas diperiksa dari aspek kelengkapan dan konsistensi. Laporan laba rugi yang disusun pada akhir kegiatan digunakan untuk menilai kemampuan mitra mengolah catatan transaksi menjadi informasi usaha.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Awal Mitra

Pemetaan awal pada delapan mitra memperlihatkan bahwa sistem pencatatan belum terstruktur. Sebagian transaksi dicatat dalam buku tulis tanpa format yang tetap, sedangkan transaksi bernilai kecil sering tidak dicatat. Pada beberapa usaha, pemilik mengandalkan ingatan untuk memperkirakan penjualan dan pengeluaran. Kondisi tersebut membuat informasi keuangan tidak dapat digunakan secara konsisten.

Masalah yang paling seragam adalah pencampuran kas. Seluruh mitra menggunakan uang hasil penjualan untuk kebutuhan usaha dan rumah tangga tanpa pencatatan

pemisahan. Dana pribadi juga kadang digunakan untuk membeli bahan baku tanpa dicatat sebagai tambahan modal. Praktik ini menyebabkan saldo usaha tidak mencerminkan posisi sebenarnya. Temuan tersebut sejalan dengan persoalan yang dibahas dalam literatur mengenai keterbatasan pengelolaan informasi keuangan pada usaha kecil.

Pada aspek HPP, enam dari delapan mitra menentukan harga terutama berdasarkan harga pasar atau pesaing. Biaya bahan utama telah diperhatikan, tetapi biaya listrik, transportasi, penyusutan, bahan penolong, dan tenaga kerja pemilik belum seluruhnya dihitung. Salah satu kasus menunjukkan bahwa omzet yang terlihat tinggi ternyata tidak menghasilkan laba setelah seluruh biaya dihitung kembali.

Hasil pre-test menunjukkan skor literasi keuangan rata-rata 42,5. Mitra umumnya masih kesulitan membedakan omzet dengan laba, memahami fungsi laporan laba rugi, dan menentukan kebutuhan modal kerja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah pencatatan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan pemahaman konsep dasar.

4.2 Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan menggunakan transaksi nyata milik mitra agar materi langsung berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Pada bulan pertama, perhatian utama diberikan pada pemisahan kas. Tim tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi membantu mitra menyusun aturan penggunaan uang usaha. Cara ini mengurangi jarak antara konsep akuntansi dan kebiasaan operasional.

Penerapan buku kas dilakukan dengan format yang disesuaikan. Bagi usaha makanan, biaya bahan yang cepat berubah dan biaya produksi harian menjadi bagian penting. Bagi usaha batik dan souvenir, perhatian diberikan pada bahan, jam kerja, dan biaya pendukung. Penyesuaian format membuat mitra tidak harus menerjemahkan sistem akuntansi yang terlalu umum ke dalam aktivitas mereka sendiri.

Pada akhir bulan pertama, tujuh dari delapan mitra telah mulai mengisi buku kas secara konsisten. Kesalahan masih ditemukan, terutama dalam pengelompokan biaya, tetapi kesalahan tersebut dapat dikoreksi melalui kunjungan berikutnya. Pendekatan siklus praktik-koreksi-praktik membuat pembelajaran berlangsung berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi.

Pengenalan BukuKas dilakukan setelah kebiasaan pencatatan mulai terbentuk. Dua mitra yang berusia di atas 50 tahun pada awalnya lebih nyaman dengan buku manual. Pendamping tidak memaksakan penggunaan aplikasi, tetapi memberikan contoh penggunaan dan melibatkan anggota keluarga yang lebih terbiasa dengan telepon pintar. Pendekatan bertahap ini membantu mitra mengenal teknologi tanpa merasa bahwa aplikasi menjadi beban tambahan.

4.3 Perubahan Literasi Keuangan

Post-test pada bulan keempat menghasilkan skor rata-rata 78,3. Dibandingkan skor awal 42,5, peningkatan mencapai 84,2% dari baseline dan melewati target program. Perubahan tidak hanya terlihat pada jawaban tes, tetapi juga pada kemampuan mitra menjelaskan aliran uang dan alasan pemisahan kas.

Mitra mulai memahami bahwa uang penjualan bukan seluruhnya laba. Sebagian harus digunakan untuk membeli kembali bahan, membayar biaya operasi, dan menjaga modal kerja. Pemahaman tersebut membantu mengurangi keputusan konsumsi yang sebelumnya dilakukan langsung dari kas penjualan.

Peningkatan juga tampak pada pemahaman HPP. Setelah pendampingan, mitra lebih mampu mengidentifikasi komponen biaya yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Salah satu pelaku batik memasukkan listrik, transportasi, dan nilai tenaga kerja ke dalam kalkulasi biaya. Berdasarkan perhitungan baru, harga jual rata-rata dinaikkan sekitar 15% dan margin usaha menjadi lebih sesuai dengan biaya sebenarnya.

4.4 Konsistensi Pencatatan dan Laporan Laba Rugi

Audit dokumen menunjukkan tujuh dari delapan mitra berhasil mempertahankan buku kas harian selama sedikitnya dua bulan. Satu mitra masih sering melewatkan transaksi kecil, seperti pembelian lem dan aksesoris. Solusi yang diterapkan adalah pengingat harian pada telepon pintar dan pemeriksaan berkala oleh pendamping. Pendekatan sederhana tersebut membantu memperbaiki konsistensi.

Seluruh mitra berhasil menyusun laporan laba rugi sederhana untuk periode satu bulan. Laporan berisi pendapatan penjualan, HPP, biaya operasional, dan laba bersih. Laporan tersebut belum dimaksudkan sebagai pengganti laporan lengkap sesuai SAK EMKM, tetapi sebagai alat evaluasi internal dan dasar komunikasi usaha. Kemampuan

menyusun laporan menunjukkan bahwa pencatatan transaksi mulai dapat diubah menjadi informasi yang berguna.

Salah satu mitra menggunakan laporan yang telah disusun untuk mendukung pengajuan KUR mikro sebesar Rp10 juta dan pengajuan tersebut disetujui pada bulan ketiga pendampingan. Contoh tersebut menunjukkan manfaat praktis administrasi keuangan bagi kebutuhan usaha, meskipun keberhasilan pembiayaan tetap dipengaruhi oleh persyaratan lembaga keuangan lainnya.

4.5 Dampak pada Keputusan Bisnis

Sebelum program, keputusan produk dan harga lebih banyak dibuat berdasarkan intuisi. Setelah memiliki catatan, beberapa mitra mulai membandingkan margin dan perputaran penjualan. Salah satu pelaku keripik buah menghentikan produksi varian nangka setelah mengetahui bahwa marginnya paling rendah dan perputarannya lebih lambat dibandingkan keripik apel dan salak. Modal kerja kemudian dialihkan ke produk yang lebih menguntungkan.

Perubahan juga terjadi pada pengelolaan uang rumah tangga. Salah satu pelaku batik mulai menetapkan batas pengambilan laba untuk konsumsi pribadi, yaitu maksimal 60%, sementara 40% dipertahankan untuk modal kerja atau tabungan pengembangan usaha. Kebijakan tersebut menjadi mungkin setelah pemilik mengetahui laba bersih secara lebih jelas.

Pada bulan keempat, kebutuhan kunjungan langsung juga menurun. Sebagian besar mitra dapat mengisi buku kas dan menyusun laporan tanpa bantuan rutin. Konsultasi hanya dilakukan ketika muncul transaksi khusus, seperti retur atau penjualan kredit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan sekaligus menjadi indikator bahwa pendampingan tidak menciptakan ketergantungan.

4.6 Akses Pasar dan Pembiayaan

Dua mitra berhasil lolos proses kurasi produk unggulan daerah dan menggunakan laporan keuangan sederhana sebagai bagian dari dokumen administratif. Produk kemudian memperoleh kesempatan dipasarkan melalui saluran penjualan yang lebih formal. Selain itu, keberhasilan salah satu mitra memperoleh KUR menunjukkan bahwa

pencatatan dapat meningkatkan kesiapan administratif ketika usaha mengakses pembiayaan.

Manfaat tersebut penting karena UMKM sering menghadapi kesenjangan antara kualitas produk dan kesiapan administrasi. Produk yang baik belum tentu mudah masuk ke pasar formal jika pemilik tidak dapat memberikan informasi dasar mengenai kegiatan usahanya. Pencatatan yang tertib membantu memperkecil kesenjangan tersebut.

4.7 Hambatan dan Strategi Adaptasi

Hambatan pertama adalah keterbatasan waktu. Pemilik usaha sering mengerjakan produksi, penjualan, dan administrasi secara bersamaan. Solusinya adalah menyederhanakan format dan membiasakan pencatatan pada waktu yang relatif tetap setiap hari. Aplikasi digital dapat digunakan untuk transaksi yang perlu dicatat segera.

Hambatan kedua adalah resistensi terhadap pemisahan uang. Bagi sebagian pemilik, satu kas terasa lebih praktis karena dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga. Pendamping menjelaskan bahwa pemisahan tidak melarang penggunaan uang usaha, tetapi mengharuskan pengambilan dicatat sehingga pemilik dapat mengetahui dampaknya terhadap modal.

Hambatan ketiga adalah literasi digital. Mitra yang lebih tua membutuhkan waktu lebih panjang untuk memahami aplikasi. Pelibatan anggota keluarga menjadi strategi adaptasi yang efektif. Selain menyelesaikan persoalan teknis, strategi ini membuka peluang transfer kemampuan kepada generasi berikutnya.

FGD pada akhir program menunjukkan bahwa mitra merasakan manfaat yang nyata. Mereka lebih percaya diri karena memiliki angka yang dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi usaha. Pernyataan salah satu mitra bahwa pencatatan membuatnya baru mengetahui apakah usaha benar-benar untung atau rugi menggambarkan perubahan fungsi pencatatan dari aktivitas administratif menjadi alat pengambilan keputusan.

4.8 Pembahasan

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pendampingan berbasis PAR bekerja melalui kombinasi pengetahuan, praktik, pengulangan, dan refleksi. Peningkatan skor literasi dari 42,5 menjadi 78,3 memperlihatkan perubahan pada aspek pengetahuan. Konsistensi tujuh

mitra dalam mengisi buku kas dan kemampuan seluruh mitra menyusun laporan menunjukkan perubahan pada aspek keterampilan.

Temuan juga memperkuat argumen bahwa sistem pencatatan UMKM sebaiknya disesuaikan dengan karakter usaha. Format yang terlalu umum berisiko membuat pemilik kembali pada kebiasaan lama. Sebaliknya, format yang langsung memuat biaya dan transaksi yang mereka hadapi setiap hari lebih mudah diterapkan. Hal ini konsisten dengan prinsip pembelajaran kontekstual dalam PAR.

Perubahan perilaku juga dipengaruhi oleh manfaat yang segera dapat dirasakan. Pemisahan kas menjadi lebih mudah diterima ketika mitra memahami hubungannya dengan perhitungan laba dan akses pembiayaan. Demikian pula, aplikasi digital lebih mudah diterima setelah mitra melihat manfaat pencatatan yang cepat. Dengan demikian, perubahan kebiasaan tidak cukup didorong oleh pengetahuan normatif; pelaku usaha perlu melihat hubungan langsung antara pencatatan dan keputusan yang mereka hadapi.

Hasil kegiatan juga mendukung pandangan bahwa teknologi seharusnya ditempatkan sebagai alat pendukung. Pada tahap awal, buku manual tetap diperlukan bagi mitra tertentu. Setelah dasar pencatatan terbentuk, aplikasi digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Urutan tersebut lebih realistis daripada menjadikan digitalisasi sebagai tujuan utama sejak awal.

Dari perspektif keberlanjutan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kenaikan skor tes. Indikator yang lebih penting adalah kemampuan mitra melanjutkan pencatatan tanpa pendamping. Berkurangnya intensitas kunjungan pada bulan keempat dan tetap berjalannya buku kas menunjukkan adanya proses internalisasi. Namun, keberlanjutan jangka panjang tetap perlu diuji melalui pemantauan setelah program berakhir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Program pendampingan pencatatan transaksi keuangan pada delapan UMKM produk unggulan di kawasan Araya Kota Malang menunjukkan bahwa perbaikan administrasi keuangan dapat dilakukan melalui pendekatan yang praktis dan partisipatif. Kondisi awal ditandai oleh pencampuran kas pribadi dan usaha pada seluruh mitra, pencatatan yang

tidak konsisten, perhitungan HPP yang belum lengkap, dan skor literasi keuangan rata-rata 42,5.

Pendampingan selama empat bulan menghasilkan peningkatan skor literasi menjadi 78,3 atau 84,2% lebih tinggi dibandingkan baseline. Tujuh dari delapan mitra mampu mempertahankan pencatatan harian sekurang-kurangnya dua bulan, sedangkan seluruh mitra mampu menyusun laporan laba rugi sederhana. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang menggunakan transaksi nyata, dilakukan secara bertahap, menyesuaikan format dengan karakter usaha dapat membantu membentuk kebiasaan baru.

Pemisahan kas, perhitungan HPP, dan laporan sederhana juga mulai digunakan untuk keputusan bisnis. Beberapa mitra dapat mengevaluasi produk berdasarkan margin, mengatur kembali penggunaan laba, serta menyiapkan dokumen yang mendukung akses pembiayaan dan kurasi produk. Dua mitra berhasil memperoleh akses pembiayaan atau kesempatan kurasi produk sesuai hasil kegiatan.

Adopsi digital memberikan manfaat tambahan, tetapi tidak dapat menggantikan pendampingan. Mitra dengan literasi digital lebih rendah membutuhkan proses yang lebih lambat dan dukungan keluarga. Dengan demikian, teknologi sebaiknya ditempatkan sebagai alat yang dipilih sesuai kemampuan pengguna.

Secara keseluruhan, model PAR memberikan dasar yang baik bagi penguatan kemandirian pengelolaan keuangan UMKM. Program juga mempunyai relevansi dengan SDG 8 dan SDG 9 karena mendukung produktivitas usaha, kesiapan akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi bisnis.

5.2 Saran

Pelaku UMKM disarankan menjadikan pencatatan sebagai bagian dari rutinitas usaha. Setiap transaksi sebaiknya dicatat pada hari yang sama dan uang usaha tetap dipisahkan dari kebutuhan rumah tangga. Pemilik juga perlu meninjau HPP dan laba secara berkala agar keputusan harga dan produk didasarkan pada data.

Tim pengabdian dan akademisi yang menjalankan program sejenis sebaiknya melakukan pemetaan karakter usaha sebelum menentukan format pencatatan. Pendampingan perlu dilakukan secara bertahap dengan frekuensi yang menurun agar

kemandirian dapat diuji. Evaluasi setelah program berakhir juga diperlukan untuk mengetahui apakah kebiasaan pencatatan tetap bertahan.

Pemerintah daerah dapat menghubungkan program pelatihan dengan pendampingan lanjutan, khususnya untuk UMKM yang menjadi sasaran program pembiayaan atau kurasi produk. Insentif akses pameran, pembinaan, dan pembiayaan dapat dikaitkan dengan kesiapan administrasi agar pelaku usaha memiliki dorongan yang jelas untuk memperbaiki pencatatan.

Lembaga keuangan dapat memperkuat literasi keuangan UMKM melalui kegiatan berbasis komunitas. Laporan sederhana yang sesuai dengan kapasitas usaha dapat digunakan sebagai titik awal sebelum UMKM diarahkan pada pelaporan yang lebih lengkap.

Pengembang aplikasi perlu mempertahankan desain yang sederhana, menyediakan panduan berbahasa Indonesia, dan memberikan dukungan bagi pengguna dengan kemampuan digital yang beragam. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pemantauan dua sampai tiga tahun untuk menguji keberlanjutan perubahan, serta melakukan replikasi pada wilayah dan jenis usaha yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Abduh, T., Remmang, H., Abubakar, H., & Karim, A. (2024). Entrepreneurship and MSME market orientation toward creative industries: Society Era 5.0 in Makassar city. *Asian Economic and Financial Review*. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i2.4964>
- Andrianto, A. (2016). Pencatatan akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap implementasi standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). *Majalah Ekonomi*, 21(2), 185–192.
- Aprilia, N., Subroto, W., & Sakti, N. (2025). The role of small and medium enterprises (SMEs) in supporting the people's economy in Indonesia. *International Journal of Research and Scientific Innovation*. <https://doi.org/10.51244/ijrsi.2024.11120036>
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13.
- Bahasoan, A. N., Wahdaniah, W., Faisalrahmat, M., Tandilintin, Y., & Bulu, Y. P. (2026). Digital payment adoption and MSME competitiveness in Indonesia: The roles of transaction efficiency, financial inclusion, and business performance. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 5(07), 1783–1798.
- Drexler, A., Fischer, G., & Schoar, A. (2014). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(2), 1–31.

- Holmes, S., & Nicholls, D. (1988). An analysis of the use of accounting information by Australian small business. *Journal of Small Business Management*, 26(2), 57.
- Horngren, C. T. (2009). *Cost accounting: A managerial emphasis*. Pearson Education India.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali Pers.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (Eds.). (2007). *Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kurniawan, S., Narsa, I. M., & Widodo, A. (2012). Mengungkap kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK-ETAP) untuk meningkatkan akses modal perbankan. *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, 22(3), 4157.
- Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(2).
- Kushnir, K., Mirmulstein, M. L., & Ramalho, R. (2010). Micro, small, and medium enterprises around the world: How many are there, and what affects the count? *MSME Country Indicators*. World Bank/IFC.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Maleha, N. Y. (2015). Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis keuangan mikro syariah. *Ekonomica Sharia*, 1(1), 59–66.
- Manehat, B. Y., & Sanda, F. O. (2022). Meninjau penerapan SAK EMKM pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 2–11.
- Mulyani, S., Gunawan, B., & Nurkamid, M. (2021). Pelatihan perhitungan harga pokok produksi bagi UMKM Kabupaten Pati. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 181–187.
- Munizu, M. (2010). Pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1), 33–41.
- Nugroho, L., Hidayat, A. R., & Badawi, A. (2020). Digital payment adoption and MSME performance in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 785–794.
- Paramitha, M. P., Mustofiyah, N., Salim, R. A. R., & Rieuwpassa, D. O. (2022). Peran digital marketing sebagai langkah peningkatan kinerja UMKM di era revolusi industri 4.0. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics*, 2(2).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.

- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1.
- Rumain, I. A. S., Mardani, R. M., & Wahono, B. (2021). Pengaruh literasi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM Kota Malang. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 10(08).
- Shaikh, A. A., & Karjaluoto, H. (2015). Mobile banking adoption: A literature review. *Telematics and Informatics*, 32(1), 129–142.
- Sinha, K. J., Sinha, S., & Sinha, B. J. (2024). Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs): The significant role and challenges in Indonesia's economy. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(3).
- Soeseno, S., Riadi, S., & Gautama, Y. (2023). Pengelolaan keuangan, SDM dan strategi pemasaran dalam mengukur kinerja usaha kecil menengah (UKM). *JEMB-Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(1), 108–122.
- Supriyono, R. A. (2011). *Akuntansi biaya: Pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok* (Edisi 2). BPFE.
- Tambunan, T. T. (2019). The impact of the economic crisis on micro, small, and medium enterprises and their crisis mitigation measures in Southeast Asia with reference to Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 19–39.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- UNDP. (2020). *Digital strategy and development resources*.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial accounting*. John Wiley & Sons.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sage.